

Balai Demokrasi Bantaran Sungai Berbasis Digital dan Kolaboratif untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu

Ach Fatori*, Mahyuni, Muhammad Farisan Kasyfi, Muhammad Gagah Dirgantara

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

*Corresponding Author: ach.fatori@ulm.ac.id

Dikirim: 18-09-2026; Direvisi: 14-10-2026; Diterima: 16-10-2026

Abstrak: Pengawasan partisipatif pemilu merupakan elemen penting dalam memperkuat kualitas demokrasi, namun keterlibatan masyarakat di wilayah bantaran sungai masih rendah akibat keterbatasan literasi, akses pembelajaran, dan lemahnya kolaborasi antarpemangku kepentingan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Balai Demokrasi Bantaran Sungai berbasis digital dan kolaboratif sebagai model penguatan pengawasan partisipatif pemilu. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui empat tahapan, yaitu persiapan, perancangan model, implementasi, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai rata-rata dari 55,50 menjadi 80,33 serta terbentuknya 30 kader pengawasan partisipatif sebagai agen perubahan di tingkat komunitas. Secara keseluruhan, program ini efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan memperkuat praktik pengawasan partisipatif pemilu serta berpotensi direplikasi sebagai model inovatif dalam penguatan demokrasi lokal berbasis komunitas.

Kata Kunci: bantaran sungai; demokrasi lokal; pengabdian kepada masyarakat; pengawasan partisipatif; teknologi digital.

Abstract: Participatory election oversight is a crucial element in strengthening the quality of democracy; however, community involvement in riverbank areas remains low due to limited literacy, lack of access to learning resources, and weak collaboration among stakeholders. This community service activity aims to develop and implement a digital and collaborative Riverbank Democracy Center as a model to enhance participatory election oversight. The method employed is a participatory approach consisting of four stages: preparation, model design, implementation, and evaluation. The results indicate a significant improvement in community knowledge, as reflected by an increase in the average score from 55.50 to 80.33, along with the establishment of 30 participatory oversight cadres who serve as change agents at the community level. Overall, this program proves effective in enhancing community capacity and reinforcing participatory election oversight practices, and it has strong potential to be replicated as an innovative model for strengthening community-based local democracy.

Keywords: community service; digital technology; local democracy; participatory oversight; riverbank communities.

PENDAHULUAN

Wilayah bantaran sungai di Kalimantan Selatan, khususnya kawasan Banjarmasin dan sekitarnya seperti Kabupaten Barito Kuala serta Kabupaten Banjar, menampilkan karakteristik sosial-spasial yang unik (Syafitri et al., 2024). Permukiman warga umumnya membentang linier mengikuti alur sungai, di mana denyut aktivitas harian sangat bergantung pada sungai sebagai prasarana transportasi, ruang interaksi publik, hingga penopang ekonomi lokal (Angriani & Alviawati,

2026; Mentayani, 2019). Meskipun kondisi ini menumbuhkan ikatan kehidupan komunal yang erat, struktur keruangan tersebut di sisi lain memicu tantangan berupa keterbatasan aksesibilitas terhadap layanan publik, khususnya dalam memperoleh pendidikan politik dan informasi kepemiluan.

Secara eksisting, masyarakat bantaran sungai masih menghadapi keterbatasan dalam memahami peran strategis mereka dalam pengawasan partisipatif pemilu (Winarto et al., 2022). Pengawasan pemilu masih dipersepsikan sebagai domain lembaga formal seperti Bawaslu, sehingga keterlibatan masyarakat cenderung pasif dan reaktif. Padahal, dalam perspektif demokrasi partisipatoris, masyarakat memiliki posisi penting sebagai aktor pengawasan yang mampu menjaga integritas proses pemilu secara langsung di tingkat akar rumput (Bidja, 2022; Hamidin & Setiawan, 2025).

Selain itu, belum tersedia ruang pembelajaran yang terstruktur dan berkelanjutan yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat secara sistematis. Kegiatan sosialisasi yang selama ini dilakukan cenderung bersifat temporer dan tidak kontekstual dengan karakter wilayah bantaran sungai. Akibatnya, pengetahuan masyarakat terkait pengawasan pemilu tidak terinternalisasi secara kuat dan tidak berkembang menjadi praktik sosial yang berkelanjutan.

Permasalahan lain yang cukup krusial adalah terbatasnya pemanfaatan teknologi digital sebagai media edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat. Meskipun penetrasi penggunaan *smartphone* di masyarakat sudah cukup tinggi, belum ada platform digital yang dirancang secara spesifik untuk mendukung pendidikan demokrasi berbasis kebutuhan masyarakat bantaran sungai. Hal ini menyebabkan potensi teknologi digital sebagai alat pemberdayaan belum dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi kelembagaan sosial, belum terbentuk ekosistem kolaboratif yang menghubungkan masyarakat, penyelenggara pemilu, dan pemangku kepentingan lokal dalam satu ruang interaksi yang berkelanjutan. Kegiatan kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan lembaga pengawas pemilu yang ada selama ini masih bersifat insidental berupa program sosialisasi satu kali kegiatan, bukan ruang interaksi yang terlembagakan secara berkelanjutan (Taufik et al., 2026). Minimnya forum dialog dan kolaborasi menyebabkan pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas kolektif serta penyelesaian masalah secara partisipatif belum berjalan efektif, sebagaimana tercermin dari kendala keterbatasan pemahaman terhadap regulasi, rendahnya literasi demokrasi masyarakat serta potensi konflik akibat kurangnya keterbukaan informasi (Daryono et al., 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah kelompok masyarakat bantaran sungai yang mencakup pemuda, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal. Permasalahan utama yang dihadapi mitra meliputi:

1. Rendahnya literasi pengawasan pemilu
2. Belum adanya ruang pembelajaran yang berkelanjutan
3. Belum terbentuknya kader pengawasan partisipatif
4. Minimnya pemanfaatan teknologi digital untuk edukasi demokrasi serta
5. Lemahnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pengawasan pemilu.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membangun dan mengimplementasikan Balai Demokrasi Bantaran Sungai berbasis digital dan



kolaboratif sebagai upaya penguatan pengawasan partisipatif pemilu. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan literasi masyarakat terkait pengawasan pemilu;
2. Membentuk kader pengawasan partisipatif di wilayah bantaran sungai;
3. Mengembangkan platform digital sebagai media pembelajaran demokrasi yang kontekstual; dan
4. Membangun ekosistem kolaboratif antara masyarakat dan pemangku kepentingan.

Secara substantif, kegiatan ini sejalan dengan fokus pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, sosial, dan penguatan demokrasi berbasis komunitas. Program ini tidak hanya memberikan peningkatan kapasitas individu, tetapi juga membangun sistem sosial yang mendukung praktik pengawasan partisipatif secara berkelanjutan. Balai Demokrasi Bantaran Sungai diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat yang adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan dalam mendukung penguatan demokrasi lokal, khususnya dalam pengawasan partisipatif pemilu.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menentukan arah dan keberhasilan program pengabdian. Pada tahap ini dilakukan koordinasi awal dengan mitra yang terdiri dari masyarakat bantaran sungai di Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar. Koordinasi ini bertujuan untuk membangun kesepahaman terkait tujuan kegiatan, peran masing-masing pihak serta komitmen dalam pelaksanaan program secara kolaboratif.



Gambar 1. Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala

Kemudian dilakukan survei lapangan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat literasi masyarakat terkait pengawasan pemilu. Survei ini dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara awal dengan tokoh masyarakat serta kelompok pemuda. Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, sebagaimana prinsip dalam pendekatan *community-based development* yang menekankan pentingnya analisis kebutuhan sebagai dasar intervensi (Natalia, 2026; Sumbi & Firdausi, 2016).



Gambar 2. Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Tabunganen Tengah, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala

Selain itu, dilakukan analisis kebutuhan (*needs assessment*) untuk mengidentifikasi permasalahan prioritas yang dihadapi masyarakat, seperti rendahnya literasi pengawasan pemilu, tidak adanya ruang pembelajaran berkelanjutan serta lemahnya kolaborasi antarpemangku kepentingan, yang menjadi dasar perancangan program kontekstual (Natalia, 2026).

Tahap persiapan ini juga mencakup penyusunan rencana kerja, penentuan indikator keberhasilan serta penyusunan instrumen evaluasi seperti *pre-test* dan *post-test* guna mengukur efektivitas intervensi (Cindoswari et al., 2025). Soal yang sama diberikan pada *pre-test* maupun *post-test* dengan jumlah sebanyak 20 butir. Nilai benar diberikan skor 5 poin dan untuk nilai salah diberikan 0 poin. Soal yang diberikan mencakup pengetahuan masyarakat mengenai persoalan dan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu, prinsip dan mekanisme pengawasan pemilu, jenis-jenis pelanggaran pemilu, cara mengidentifikasi dan mengenali dugaan pelanggaran, prosedur serta mekanisme pelaporan pelanggaran kepada Bawaslu serta peran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Tahap ini tidak hanya berfungsi sebagai pengumpulan data awal, tetapi juga sebagai fondasi dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program pengabdian.

Tahap Perancangan Model

Tahap perancangan model difokuskan pada pengembangan konsep Balai Demokrasi Bantaran Sungai berbasis digital dan kolaboratif sebagai inovasi dalam penguatan pengawasan partisipatif pemilu. Model ini dirancang sebagai integrasi antara ruang belajar komunitas (*offline*) dengan platform digital (*online*) yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat bantaran sungai.

Dalam tahap ini, dilakukan penyusunan kurikulum edukasi yang mencakup materi pengawasan partisipatif pemilu, jenis pelanggaran pemilu serta peran strategis masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi. Kurikulum dirancang secara kontekstual dengan mempertimbangkan latar belakang sosial dan tingkat pemahaman masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *participatory learning* yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran (Freire, 2000).

Selain itu, dilakukan perancangan sistem kaderisasi pengawasan partisipatif yang bertujuan untuk menciptakan agen perubahan di tingkat komunitas. Sistem ini meliputi mekanisme rekrutmen, pelatihan serta pendampingan kader agar mampu menjalankan fungsi edukasi dan pengawasan secara mandiri di lingkungan masing-masing.

Pengembangan platform digital juga menjadi bagian penting dalam tahap ini, yang dirancang sebagai media edukasi, diseminasi informasi serta ruang interaksi antar masyarakat. Dengan demikian, model yang dikembangkan tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan dan berbasis teknologi.

Tahap Implementasi

Tahap implementasi merupakan tahap pelaksanaan kegiatan inti pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini diawali dengan pelaksanaan edukasi demokrasi melalui penyuluhan dan diskusi partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Materi yang disampaikan difokuskan pada peningkatan literasi pengawasan pemilu serta kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.

Selanjutnya, dilakukan pelatihan pengawasan partisipatif yang bersifat praktis, seperti simulasi identifikasi pelanggaran pemilu dan mekanisme pelaporan. Pendekatan ini mengadopsi konsep *experiential learning* yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi nyata (Kolb, 2015).

Implementasi kegiatan juga didukung oleh pemanfaatan platform digital sebagai media pembelajaran tambahan dan komunikasi antar peserta. Integrasi antara kegiatan offline dan online ini bertujuan untuk memperluas jangkauan edukasi serta memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program dalam meningkatkan kapasitas masyarakat terkait pengawasan partisipatif pemilu. Evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dampak kegiatan.

Secara kuantitatif, evaluasi dilakukan melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan setelah mengikuti kegiatan. Hasil dari kedua pengukuran tersebut dianalisis untuk mengetahui tingkat efektivitas program dalam meningkatkan literasi masyarakat. Secara kualitatif, evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif dan wawancara untuk melihat perubahan sikap, tingkat partisipasi serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan pemilu. Hasil observasi dianalisis dengan memperhatikan keterlibatan peserta selama diskusi, kemampuan mengidentifikasi potensi pelanggaran pemilu serta pemahaman terhadap mekanisme penyampaian laporan kepada Bawaslu. Sementara itu, wawancara digunakan untuk menggali pemahaman peserta mengenai pentingnya pengawasan partisipatif, kesediaan melaporkan dugaan pelanggaran, dan kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini penting untuk menangkap aspek perubahan sosial yang tidak dapat diukur secara numerik (Creswell & Creswell, 2018).



Selain itu, evaluasi juga mencakup aspek keberlanjutan program, seperti aktivitas kader yang telah terbentuk dan pemanfaatan platform digital oleh masyarakat. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan program, tetapi juga sebagai dasar dalam perbaikan dan pengembangan program ke depan.

IMPLEMENTASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Tabunganen Tengah, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala. Daerah tersebut merupakan dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,2–3 m di bawah permukaan air laut, yang kemudian sebagian besar wilayahnya tergenang sepanjang tahun. Karena merupakan dataran rendah maka di wilayah tersebut sering tumbuh hutan galam yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan dan juga tumbuhan purun berguna untuk anyaman tikar, bakul dan sebagainya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 di Desa Tabunganen Tengah dengan melibatkan masyarakat sebanyak 30 orang yang terdiri dari aparat desa, pemuda desa, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran.

Pada tahap awal implementasi, kegiatan difokuskan pada edukasi demokrasi dan pengawasan partisipatif pemilu melalui penyuluhan dan diskusi kelompok. Materi yang disampaikan meliputi konsep pengawasan partisipatif, jenis-jenis pelanggaran pemilu serta peran masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Kegiatan ini berlangsung secara interaktif dengan melibatkan peserta dalam diskusi dan studi kasus, sehingga mendorong pemahaman yang lebih kontekstual.

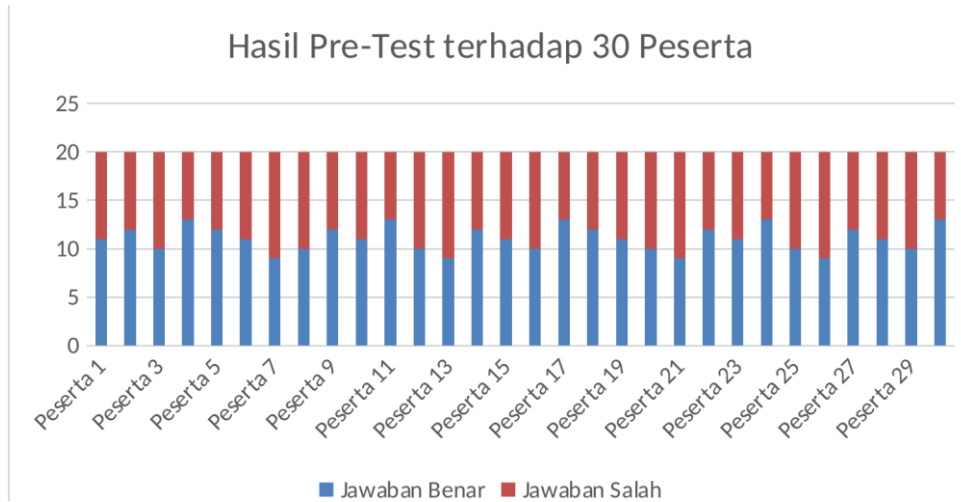
Kemudian dilakukan pelatihan berbasis praktik (*experiential learning*) yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam mengidentifikasi dan melaporkan potensi pelanggaran pemilu. Peserta dilibatkan dalam simulasi kasus, *role play* serta latihan penyusunan laporan sederhana. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan praktis masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Kolb (2015) bahwa pembelajaran berbasis pengalaman mampu meningkatkan retensi dan pemahaman peserta.

Tahap berikutnya adalah pembentukan kader pengawasan partisipatif, yang dipilih dari peserta yang menunjukkan tingkat partisipasi dan pemahaman yang tinggi. Kader yang terbentuk kemudian diberikan pembekalan lanjutan serta pendampingan untuk menjalankan peran sebagai agen edukasi di tingkat komunitas. Dalam kegiatan ini, terbentuk sebanyak 20 kader pengawasan partisipatif yang tersebar di berbagai RT di Desa Tabunganen Tengah.

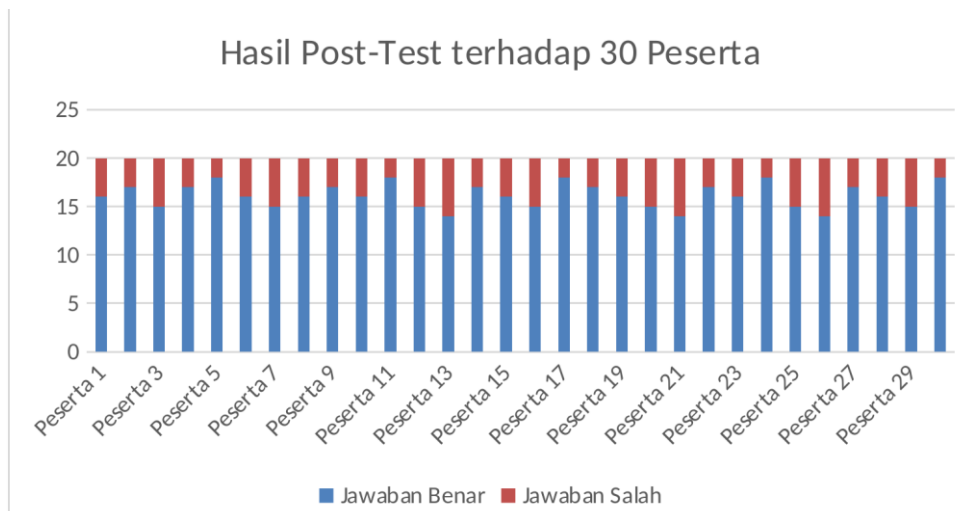
Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan dalam aspek pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pengawasan partisipatif pemilu. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test*, rata-rata nilai peserta mengalami peningkatan dari 55,50 pada *pre-test* menjadi 80,33 pada *post-test*, yang menunjukkan peningkatan sebesar 24,83 poin.





Gambar 3. Grafik Hasil *Pre-Test*



Gambar 4. Grafik Hasil *Post-Test*

Selain peningkatan secara kuantitatif, hasil kualitatif juga menunjukkan adanya perubahan sikap dan perilaku peserta. Masyarakat menjadi lebih aktif dalam diskusi, lebih memahami peran strategisnya dalam pengawasan pemilu serta menunjukkan ketertarikan untuk terlibat dalam kegiatan pengawasan di lingkungan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kritis masyarakat.

Dari aspek kelembagaan, terbentuknya kader pengawasan partisipatif menjadi indikator penting keberhasilan program. Kader yang terbentuk tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga sebagai fasilitator lokal yang mampu menyebarluaskan pengetahuan kepada masyarakat lain. Hal ini menunjukkan adanya proses regenerasi aktor pengawasan di tingkat komunitas.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang digunakan dalam program ini efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Keterlibatan aktif peserta dalam proses

pembelajaran memungkinkan terjadinya internalisasi pengetahuan yang lebih kuat dibandingkan metode konvensional yang bersifat satu arah (Kolb, 2015).

Peningkatan nilai *pre-test* dan *post-test* menunjukkan bahwa metode edukasi yang digunakan mampu menjawab permasalahan rendahnya literasi pengawasan pemilu di masyarakat bantaran sungai. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendekatan partisipatif (pelibatan komunitas melalui kegiatan sosialisasi, diskusi, dan pendidikan pengawasan) dalam pengabdian masyarakat mampu meningkatkan efektivitas program edukasi dan pemberdayaan (Natalia, 2026).



Gambar 5. Foto Bersama Saat Pelaksanaan Kegiatan

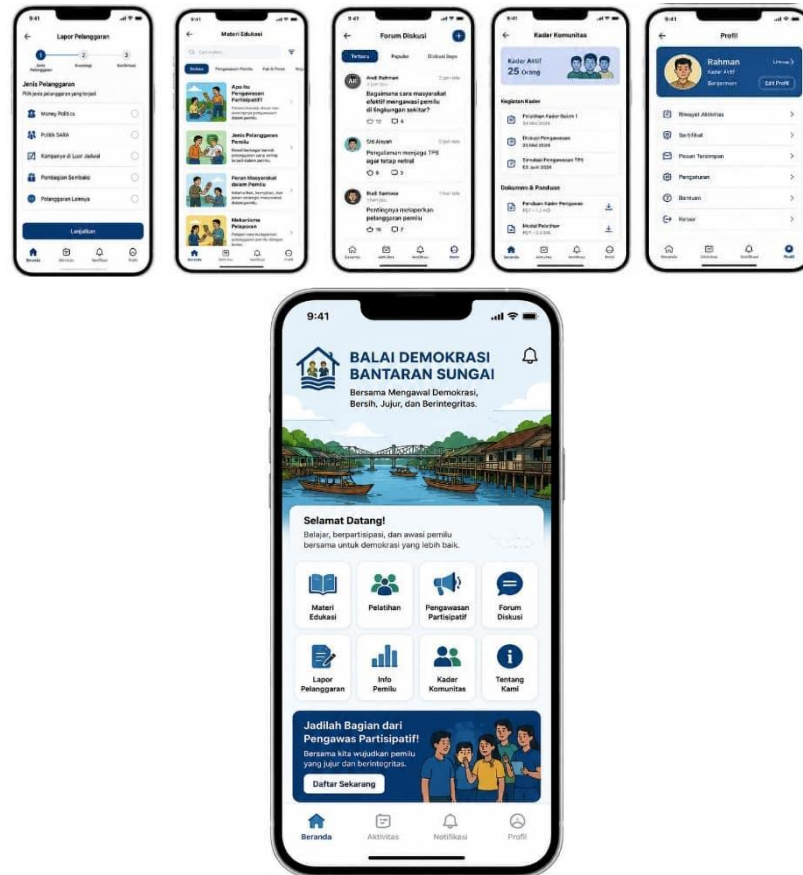
Pembentukan kader pengawasan partisipatif juga menjadi temuan penting dalam kegiatan ini. Keberadaan kader sebagai agen lokal menunjukkan bahwa program tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan. Dalam perspektif *community empowerment*, keberadaan aktor lokal merupakan kunci dalam menjaga keberlanjutan program sosial di masyarakat.



Gambar 6. Wawancara Tokoh Agama Desa Tabunganen Tengah

Dari sisi inovasi, perlu dibuat integrasi antara ruang belajar komunitas dan platform digital dalam bentuk Balai Demokrasi Bantaran Sungai dapat menjadi

keunggulan program ini ke depannya. Model ini akan mampu menjawab keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan politik sekaligus memanfaatkan teknologi sebagai alat pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan konsep digital empowerment yang menekankan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (Hushin, 2025). Adapun rancangan platform yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:



Gambar 7. Rancangan *Layout* Aplikasi Balai Demokrasi Bantaran Sungai yang Dikembangkan

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi program, terutama terkait dengan tingkat literasi digital masyarakat yang masih beragam. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas digital perlu menjadi bagian dari strategi pengembangan program ke depan. Secara umum, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas yang dikombinasikan dengan teknologi digital dan penguatan kolaborasi mampu menjadi model efektif dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pemilu di masyarakat bantaran sungai.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan Balai Demokrasi Bantaran Sungai berbasis digital dan kolaboratif terbukti mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengawasan partisipatif pemilu. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta tumbuhnya kesadaran akan peran strategis mereka sebagai aktor pengawasan di

tingkat lokal. Program ini tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam praktik pengawasan pemilu di lingkungan masing-masing.

Pendekatan partisipatif yang dikombinasikan dengan metode pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) terbukti efektif dalam memperkuat internalisasi pengetahuan menjadi praktik sosial. Selain itu, pembentukan kader pengawasan partisipatif menjadi indikator penting keberhasilan program dalam menciptakan agen perubahan di tingkat komunitas. Integrasi antara ruang belajar komunitas dan platform digital juga menunjukkan potensi sebagai model inovatif dalam pendidikan demokrasi yang adaptif, fleksibel, dan berkelanjutan.

Tantangan dalam aspek literasi digital masyarakat masih menjadi perhatian, sehingga diperlukan penguatan kapasitas digital sebagai bagian dari pengembangan program ke depan. Oleh karena itu, model Balai Demokrasi Bantaran Sungai direkomendasikan untuk direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut dengan memperkuat aspek teknologi, kaderisasi, dan kolaborasi berbagai pihak. Secara garis besar, program ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas yang terintegrasi dengan teknologi digital akan mampu menjadi strategi efektif dalam memperkuat demokrasi lokal, khususnya dalam pengawasan partisipatif pemilu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Tabunganen Tengah, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, beserta aparat desa, tokoh masyarakat, pemuda desa, dan komunitas lokal yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Kuala atas dukungan dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan, serta kepada Universitas Lambung Mangkurat melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas dukungan pendanaan dan fasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Angriani, P., & Alviawati, E. (2026). River space use patterns: Case of the Barito River bank, Banjarmasin – Indonesia. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 13(1), 104–116. <https://doi.org/10.20527/jpg.v13i1.23366>
- Bidja, I. (2022). Fungsi pengawasan partisipatif dalam mewujudkan pemilu demokratis. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2740>
- Cindoswari, A. R., Salsabila, L., Riswandi, Alia, R., Elisa, Wulandari, A., & Gea, R. G. (2025). Pelatihan literasi politik dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula pada pelajar di Kota Batam. *Parahita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 52–63. <https://doi.org/10.25008/xb94wz41>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Daryono, Indarti, N., Firmansyah, M. B., & Umro, J. (2026). Pendampingan penyelenggaraan pemilihan kepala dusun: Transparan dan akuntabel di Desa



- Wonokerto Kabupaten Pasuruan. *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat*, 3(1), 159–166. <https://doi.org/10.62383/harmoni.v3i1.2934>
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed.). Continuum.
- Hamidin, B. N., & Setiawan, H. (2025). Grassroots election oversight: Enhancing electoral accountability and civic engagement. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(1), 57–72. <https://doi.org/10.15575/jispo.v15i1.44039>
- Hushin, H. (2025). Increasing global access to education with digital technology. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 3(4), 167–176. <https://doi.org/10.47353/ijedl.v3i4.259>
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Pearson Education.
- Mentayani, I. (2019). Identitas dan eksistensi permukiman tepi sungai di Banjarmasin. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 4(3), 497–502.
- Natalia, M. D. (2026). Peran pemberdayaan komunitas dalam mendorong efektivitas program pengawasan partisipatif pemilu oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. *TsaQofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 6(1), 517–528. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v6i1.8238>
- Sumbi, K., & Firdausi, F. (2016). Analisis pembangunan berbasis masyarakat dalam pengembangan sumber daya masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 41–45.
- Syafitri, A., Puteri, E., Aufa, N., & Mentayani, I. (2024). Identifikasi pola spasial permukiman bantaran Sungai Martapura di kawasan Kota Banjarmasin. *Tesa Arsitektur*, 22(1), 43–54. <https://doi.org/10.24167/tesa.v22i1.12104>
- Taufik, M., Ariyadi, F., Sofian, N., Muthia, Rabiatul, S., Herman, W., & Sunardi. (2026). Memperkuat kesadaran dan partisipasi politik bagi pemilih pemula. *Ruang Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 21–28. <https://doi.org/10.24252/rkjpm.v4i1.66989>
- Winarto, A. E., Huda, H. M. D., & Ningtyas, T. (2022). Peran Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengawasan Pemilu 2019. *Reformasi*, 12(2), 331–343. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i2.3742>

